

## Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan<sup>1</sup>

Paulus Rudolf Yuniarto

### *Abstract*

*There are two fundamental issues facing globalization problem today's, namely the economic competition and the threat of the nation's unity as the question of regional conflict. Indonesia, in this context, is expected more conscious and aware to various challenges of globalization. To respond the globalization challenges, since 2006, through a variety of research from research centers under Social and Humanities Deputies, Indonesia Institute of Science has addressed these challenges. Through a study of literature on all those conducted research, the availability of information and the institutional arrangement for the stakeholders (local and national) with reference to globalization problem has still become a fundamental issue. This paper aimed to recommendation policy on globalization in Indonesia, regarding the need for cooperation in the form of joint ventures and strategic alliances between governments, transnational actors and civil society. All those stakeholder are required to and obliging in order to face competition and also as part of disputes solutions as well as capacity building to prepare rough leader cadres. The Government could facilitate such efforts.*

*Keywords: Globalization, Stakeholder, Policy, Challenges*

### **Pendahuluan: Tentang fakta globalisasi yang 'bermasalah'**

Fenomena globalisasi merupakan sesuatu yang tak terelakkan, sesuatu yang pasti terjadi, selain memberi manfaat secara ekonomi namun membawa juga implikasi pada banyak aspek kehidupan manusia, yang pada akhirnya mensyaratkan masyarakat agar dapat melakukan adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya saja, perubahan arus perdagangan internasional membuat produk yang diciptakan negara di belahan benua lain dapat dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan sampai di pelosok kota/desa di benua lainnya. Arus modal internasional membawa implikasi di pindahkannya

---

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan pengembangan dari makalah awal berjudul *Globalisasi dan Regionalisme: Kompleksitas Isu dan Pertalian Kepentingan Antar Aktor* yang dipresentasikan untuk kegiatan Seminar Refleksi Akhir Tahun Kedeputian IPSK LIPI 2011 bertajuk "Mempersiapkan Indonesia Menyongsong Era Baru 2015" tanggal 20 Desember 2011. Gd. Widya Graha Lt. 1 Jakarta. Penulis ucapkan terimakasih pada para peneliti LIPI: Mochtar Pabottingi, Rusydi Syahra, Carunia M. Firdausy, Adriana Elisabeth, dan Nanto Sriyanto atas komentar dan saran yang diberikan bagi penyempurnaan tulisan ini.

industri di negara maju ke negara berkembang, untuk mendapatkan tenaga buruh murah. Perubahan teknologi informasi memungkinkan berita-berita internasional diketahui seluruh dunia hanya dalam beberapa saat. Liberalisasi pasar nasional dan global membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya berbagai produk dan jasa bagi para konsumen di suatu negara. Akhirnya globalisasi turut mengubah pola berpikir dan berperilaku masyarakat.

Bersandar pada pendapat para ahli, seperti Roland Robertson dan David Held misalnya, mereka mengatakan bahwa perkembangan globalisasi sebenarnya bukan perkara baru dan telah dimulai sejak era imperium pada abad ke-15 dan berkembang dengan terbentuknya negara bangsa pada abad ke-17 (dalam Mubah 2010). Kemudian, penemuan-penemuan alat komunikasi dan transportasi telah mengakselerasi proses globalisasi sehingga memunculkan sebuah perubahan sosial akibat dari perkembangan teknologi yang memfasilitasi terjadinya pertukaran budaya dan transaksi ekonomi internasional. Dalam konteks ini, gagasan globalisasi tampaknya seringkali dipakai untuk merujuk pada perluasan dan pendalaman arus perdagangan, modal, teknologi, informasi internasional dalam sebuah pasar global yang cenderung terintegrasi. Selanjutnya James Petras dan Henry Veltmeyer mengatakan globalisasi dapat dimaknai sebagai proses liberalisasi pasar nasional dan global yang mengarah pada kebebasan arus perdagangan, modal maupun informasi dengan kepercayaan bahwa situasi ini akan menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia (Petras&Veltmeyer 2001: 11). Dalam pemaknaan yang lain, globalisasi juga bukan semata-mata terbatas pada ide kosmopolitanisme dalam arti semata gejala mondial, namun juga glocalisasi (*think globally act locally*). Di sini fenomena yang dikemukakan oleh Naisbitt menjadi salah satu contoh yang mengemuka. Dimana perpindahan lokasi industri menjadi pilihan untuk kedekatan sumber daya, serta juga perampingan struktur perusahaan seperti yang berkembang dengan perusahaan e-company semacam google[dot]com (Naisbitt 1995: 191).

Bila semua pandangan itu digabungkan, idea atau gagasan globalisasi dapat kita pahami sebagai suatu kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Artinya, bahwa suatu bentuk perilaku kehidupan, seperti pertukaran barang dan jasa, tidak hanya pertukaran modal, tetapi juga hal-hal lain semacam perkembangan ide-ide mengenai demokratisasi, hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, migrasi atau berbagai fenomena *human trafficking* yang melintas batas-batas lokalitas dan nasional kini merupakan fenomena umum yang berlangsung hingga ke tingkat komunitas paling lokal sekalipun (Arfani 2010: 1). Atau dengan kata lain, komunitas domestik atau lokal kini adalah bagian dari rantai perdagangan, pertukaran ide maupun perusahaan transnasional.

Pada masa sekarang, globalisasi telah menjadi sorotan sekaligus menjadi masalah yang sangat tajam di Indonesia (juga di negara-negara berkembang lainnya) terkait dengan kemungkinan datangnya pesaing-pesaing dari negara maju yang ikut berkompetisi dalam perekonomian liberal dunia dengan kekuatan ekonomi mereka yang tentu saja pasti jauh lebih kuat. Hal ini sering dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap seluruh bidang kehidupan sosial dan ekonomi yang dalam perkembangannya mengancam persatuan dan kesatuan suatu bangsa karena konflik yang ditimbulkannya. Dua poin yang baru saja disebutkan adalah masalah mendasar yang menghadapi masalah globalisasi, yaitu kompetisi (persaingan ekonomi) dan ancaman persatuan bangsa. Pengaruh arus globalisasi pada dasarnya sulit untuk dapat dicegah dan memerlukan adanya perhatian dalam berbagai kemungkinan-kemungkinan tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang ada serta kebijakan dan strategi untuk menanggulangnya. Indonesia, dalam hal ini, tentu saja di harapkan akan menjadi lebih sadar akan pentingnya mewaspadaai berbagai kemungkinan tantangan globalisasi. Sebab, pada era demokrasi ekonomi yang kita anut sekarang, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, bangsa Indonesia akan memasuki pusaran arus globalisasi dunia, suatu era yang penuh tantangan dan juga peluang.

Globalisasi dan segala isinya saat ini telah berkembang menjadi tema kajian yang cukup sering dibahas, terutama karena fenomena ini sangatlah kompleks yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi.<sup>2</sup> Berkaitan dengan perkembangan proses globalisasi, tulisan ini akan menelaah berbagai tema yang berkaitan dengan globalisasi. Metode penulisan yang dilakukan adalah dengan melakukan pembacaan (studi literature) kajian mengenai globalisasi yang dilakukan di bawah pusat-pusat penelitian di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK LIPI), yang mana telah banyak menghasilkan kajian, temuan dan analisa penelitian, yang sebagian telah dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan, terutama bagi pemerintah (para pengambil kebijakan) dan berbagai pihak/pemangku kepentingan di dalam negeri. Kemungkinan bahwa dalam pembacaan terhadap studi globalisasi di IPSK LIPI ini masih mengandung banyak kekurangan, baik sumber data maupun analisis yang diberikan. Tulisan ini sesuai dengan judul makalah adalah hendak memperlihatkan mengenai kompleksitas isu dalam masalah globalisasi sekaligus memperlihatkan berbagai macam kepentingan dan kebijakan di

---

2 Pandangan-pandangan yang muncul dalam melihat globalisasi antara lain; ada pandangan yang melihat bahwa globalisasi (terutama integrasi ekonomi) sebagai sebuah proses sejarah yang mendorong tercapainya peningkatan suatu kemajuan ekonomi suatu wilayah, menciptakan perdamaian, dan juga demokrasi bagi warga dunia. Di sis yang lain ada pula yang memandang bahwa, globalisasi melalui integrasi ekonomi (justru) akan mengakibatkan bentuk-bentuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan, atau semakin mendorong terciptanya kemiskinan baru. Di kalangan ilmuwan, banyak perbedaan dalam memaknai proses globalisasi ini dan juga perbedaan definisi yang disesuaikan dengan lingkup kajian, idealisme, maupun perspektif yang mereka gunakan.

dalamnya yang dapat menjadi perhatian kita semua dan diharapkan informasi yang diberikan dapat menjadi bahan bagi pemerintah dan pemerhati masalah globalisasi agar dapat menjawab tantangan dari globalisasi itu sendiri.

### **Beberapa Kajian Mengenai Globalisasi**

Melihat implikasi yang isunya begitu beragam tetapi begitu mendalam dan spesifik konteks persoalannya, globalisasi bukanlah fenomena hitam putih yang bisa secara mudah dan cepat dipahami. Fenomena umum yang disebutkan di atas berada di sekitar kita, bahkan *embedded* dengan berbagai kepentingan kita. *Global governance*, integrasi ekonomi, regionalisme, liberalisasi perdagangan, daya saing, *common market*, transnasional migrasi, *political union*, *human security*, dan lain-lain adalah sebagian istilah maupun persoalan yang berkembang dalam proses globalisasi. Persoalan globalisasi dan segala kaitannya di berbagai area tidak saja menggambarkan kompleksitas persoalan dan kajiannya, tetapi juga sekaligus menawarkan ide atau berbagai alternatif bentuk pengelolaan dan penyelesaian persoalan di seputar isu tersebut.

Beberapa isu dalam globalisasi antara lain dapat di kelompokkan dalam beberapa tema kajian sebagai berikut.

#### ***1. Regionalisme: Upaya Integrasi Wilayah Menjadi Satu Entitas***

Salah satu ciri penting globalisasi adalah dunia dan pasar kini terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain ke dalam satu lingkungan (*region*). Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah regionalisme ekonomi ASEAN dan pembentukan komunitas ekonomi ASEAN (Elisabeth 2009). Studi ini memperlihatkan bahwa Asia Tenggara yang menjadi bagian penting dalam rantai globalisasi merasa perlu membangun kerja sama regional. Pemerintah negara Asia Tenggara sebagai pelaku globalisasi ekonomi kemudian membentuk ASEAN yang berupaya (salah satunya) mengintegrasikan kawasan ke dalam ekonomi dunia. Melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh kebijakan untuk menarik masuk investasi modal asing lantas mendirikan kawasan perdagangan bebas (ASEAN Free Trade Area/FTA). Secara bertahap negara-negara ASEAN mulai merapkan program, salah satunya yaitu membuka pasar dalam negerinya dan membuka perjanjian tentang pengembangan spesialisasi industri di antara negara-negara ASEAN. Indonesia sendiri memilih untuk menjadi "sentra" industri otomotif, namun pada kenyataannya industri otomotif yang berkembang justru terjadi di Thailand. Industri sepeda motor di Thailand bahkan telah menjadi sebuah sistem industri yang sudah mapan rantai produksinya. Sebenarnya, kebijakan globalisasi ini dijalankan seiring dengan

diberlakukannya kebijakan untuk menggalang kerjasama ekonomi regional. Kebijakan ini didasarkan pada azas saling menguntungkan, dimana setiap negara akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila melakukan integrasi ekonomi ini secara bersama-sama daripada melakukannya secara sendiri-sendiri. Terciptanya regionalisme ekonomi di Asia Tenggara diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan ini terutama bagi penanaman modal dari luar (*foreign direct investment*/FDI) agar kawasan ASEAN tidak hanya menjadi daerah produksi tetapi juga ekspor bagi negara lain. Dengan kata lain, integrasi ekonomi regional ASEAN berkembang ke arah yang lebih terbuka atau menjadi *open regionalism*.

Perkembangan terkini, studi regionalisme ASEAN adalah kesepakatan untuk membentuk Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada 2015 melalui tiga pilar: Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*/AEC), Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*/APSC), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*/ASCC). Berawal dari gagasan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang dikaitkan dengan isu-isu perdagangan bebas barang, jasa dan investasi kemudian secara sistematis dan konseptual, analisis dimulai dengan pembahasan mengenai perkembangan konsep regionalisme dikaitkan dengan pembentukan AEC, serta pembahasan tentang pasar tunggal ASEAN. Satu hal yang paling kontroversial dalam pembentukan AEC adalah rencana pembentukan pasar tunggal ASEAN (*ASEAN single market*). Persoalannya bukan hanya mengenai pencapaian target waktu yang telah ditetapkan pada 2015, melainkan juga kemungkinan ASEAN membentuk pasar tunggal tanpa melalui uni pabean (*customs union*). Indonesia dalam hal ini telah ditetapkan sebagai koordinator sektor otomotif, salah satu dari 12 sektor prioritas dalam AEC. Peran ini merupakan peluang bagi Indonesia meningkatkan daya saing secara regional, sekaligus menjadi tantangan, khususnya dalam memanfaatkan peluang dan menyiapkan langkah-langkah strategis menuju AEC pada 2015. Upaya Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN sangat relevan dengan kesepakatan untuk mempertahankan kerjasama ekonomi regional yang terbuka, agar mampu berkontribusi dalam liberalisasi perdagangan global, serta menciptakan kawasan yang kompetitif dan dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi relatif setara (*equitable*).

Tantangan utama dalam membentuk pasar tunggal ASEAN ini sangat berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara yang masih dipegang teguh dan dijalankan oleh setiap negara anggota ASEAN. Sedangkan integrasi ekonomi kawasan yang utuh membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama untuk "mengurangi derajat kedaulatan negara" melalui kesepakatan perdagangan dan investasi yang dapat berlaku di setiap negara ASEAN. Sampai saat ini, ASEAN masih mengutamakan pendekatan harmonisasi, termasuk dalam

harmonisasi peraturan, meskipun sudah ada kesepakatan bersama untuk menjalankan kebijakan *ASEAN single window* yang harus terlebih dahulu diterapkan di tingkat nasional (Lihat Laporan Tim ASEAN P2P, dalam Wulandari 2009).

Selain isu regionalisme ASEAN, yang patut diperhatikan juga adalah pertumbuhan ekonomi yang amat pesat di kawasan Asia Timur Laut (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Cina Daratan) yang berdampak positif pada negara-negara anggota Asia Tenggara (ASEAN) karena terjadi peningkatan pesat dalam perdagangan antar negara dari kedua kawasan ini (Lihat Thee Kian Wie 2010: 1-8). Di samping ini negara-negara dari kawasan Asia Timur Laut sejak akhir 1980-an juga telah muncul sebagai sumber investasi asing langsung terbesar di kawasan Asia Tenggara (Thee Kian Wie 2010). Suatu aspek lain yang menarik dari integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur Raya adalah apa yang dinamakan fragmentasi produk (*product fragmentation*), yaitu penyebaran produksi dan perakitan komponen mobil (*auto parts*), komponen elektronika, dan komponen computer serta komponen-komponen dari barang-barang lain (kamera, pesawat TV, barang optik, perlengkapan musik, arloji, mesin jahit, barang-barang kimia dan farmasi, garmen) di berbagai negara dalam proses produksi yang terintegrasi secara vertikal. Fragmentasi produk ini dipicu oleh perluasan yang amat pesat dari kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan transnasional (*transnational corporations/TNCs*) dalam ekonomi global selama tiga dasawarsa terakhir (Athukorala 2007 dalam Thee 2010: 6). Beberapa aspek dari integrasi ekonomi regional di atas menunjukkan dengan jelas bahwa integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur (Asia Timur Laut dan Asia Tenggara) selama beberapa dasawarsa terakhir telah berlangsung dengan pesat dan saling menguntungkan. Oleh karena ini ditinjau dari segi kajian wilayah, berbagai aspek dari integrasi ekonomi regional di Asia Timur patut dikaji secara lebih mendalam (Thee Kian Wie 2010: 7).

## *2. Dampak Perkawinan Investasi dan Liberalisasi Perdagangan*

Globalisasi dalam salah satu definisi yang dikemukakan Jan A. Scholte (2000) berarti liberalisasi, yaitu proses penghapusan hambatan ekonomi dan perdagangan menuju dunia tanpa batas dan terbuka. Liberalisme ekonomi menjamin adanya kebebasan bagi *semua* insan/pelaku ekonomi untuk menentukan sendiri apa yang akan dikonsumsi, apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan bebas untuk memperdagangkannya. Namun bukan berarti liberalisme tanpa aturan. Aturan dan pengaturan merupakan keharusan dan harus disepakati bersama. Tanpa aturan dan pengaturan, kebebasan seseorang bisa mengurangi kebebasan orang lain, dan ini bertentangan dengan jiwa dari liberalisme ekonomi. Salah satu bentuk

liberalisasi perdagangan yang berkembang terwadahi dalam *World Trade Organisation* (WTO) dengan neoliberalisme sebagai ideologi utamanya. Hal inilah yang lebih jauh menjadi fokus penelitian Pusat Penelitian Politik dan Pusat Penelitian Ekonomi IPSK LIPI<sup>3</sup> dalam melihat kaitannya globalisasi dengan isu-isu perdagangan dan juga dampaknya terutama di sektor pertanian, industri dan tenaga kerja.

Salah satu penelitian ini melihat bahwa globalisasi telah berdampak luas pada pertanian di negara-negara dunia ketiga, terutama Indonesia. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan ketergantungan pada berbagai input luar adalah bukti konkritnya. Pencabutan subsidi, privatisasi sumberdaya dan institusi pemerintah, longgarnya kran impor sebagai prasyarat untuk ekspor, lenyapnya berbagai sumberdaya dan budaya lokal, membiasnya pemberdayaan, dan mandegnya inovasi merupakan dampak langsung dari globalisasi. Penelitian ini telah menjawab konsekuensi-konsekuensi yang diterima Indonesia dengan tergabungnya dalam WTO. Tampaknya kondisi dan posisi sektor pertanian di era globalisasi secara umum masih memprihatinkan, perlu upaya meningkatkan produksi beras melalui produksi dan pengelolaan paska panen, perkembangan ekspor komoditas pertanian juga belum menggembirakan, perhatian terhadap pembangunan agroindustri sangat diperlukan, kemudian sub sektor perikanan perlu diidentifikasi sebagai sub-sektor yang dapat mendukung ketahanan sektor pertanian, dan terakhir pengembangan sub sektor kehutanan yang masih terbatas perlu untuk di tingkatkan. Di level masyarakat, bagaimana *civil society* di Indonesia merespon konsekuensi yang timbul dan juga posisi pemerintah Indonesia menghadapi respon masyarakat sipil ini di jawab pula. Globalisasi secara bersamaan mengandung dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi ini kemudian menjadi fokus respon kelompok *civil society* (LSM) yang tertuang dalam berbagai bentuk agenda, termasuk komunikasi dengan pemerintah. Pemerintah perlu menyadari bahwa komitmen Indonesia terhadap globalisasi tidak serta merta meninggalkan tanggung jawabnya untuk melindungi warga negaranya dari dampak negatif globalisasi.

Dalam bidang liberalisasi perdagangan dan investasi, bahwa selain globalisasi telah mendorong terjadinya perubahan (ketimpangan) dalam struktur ketenaga kerjaan global (dimana hal ini perlu pemecahan masalah yang di lakukan secara bersama-sama), globalisasi juga telah mengubah dinamika perekonomian nasional yang mana mekanisme pasar jauh

3 Beberapa penelitian yang telah di lakukan tersebut antara lain dalam penelitian Agus R. Rahman dkk. 2007. *Globalisasi dan Gerakan Anti Globalisasi di Indonesia*. P2P LIPI. LIPI Press, Jakarta; Carunia Mulya Firdausy (ed). 2005. *Pengembangan Sektor Pertanian di Era Globalisasi*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta; Carunia Mulya Firdausy (ed). 2004. *Liberalisasi Perdagangan dan Investasi di Era Globalisasi*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta; Tim Peneliti P2E LIPI. 2010. *Liberalisasi, Dominasi Asing dan Kemiskinan Di Indonesia*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.

menentukan ketimbang peran pemerintah. Berkurangnya peran pemerintah di khawatirkan menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengorbankan pelaku ekonomi dengan daya saing rendah. Namun di sisi lain, globalisasi perlu untuk memberikan motivasi setiap pelaku ekonomi untuk bertindak efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi. Lantas bagaimana dengan keadaan perdagangan dan investasi di Indonesia. Tampaknya, keadaan perdagangan dan investasi mulai mengalami perubahan secara perlahan. Peningkatan laju investasi domestik dan asing mulai berkembang seiring dengan membaiknya dinamika iklim usaha yang telah di rumuskan dalam kebijakan ekonomi nasional. Namun secara umum, upaya pengembangan investasi dan perdagangan nasional di era globalisasi harus terus dilakukan.

Pemikiran penting yang lain; *pertama*, investasi dan perdagangan sebaiknya tidak hanya dilakukan pada sektor pertanian, melainkan juga pada sektor atau komoditi yang spesifik dapat diproduksi oleh berbagai daerah di Indonesia. Hal yang sama juga harus dilakukan dalam memanfaatkan perdagangan lintas batas dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Pemanfaatan investasi dan perdagangan di daerah lintas batas telah memberikan kontribusi yang besar tidak hanya bagi perekonomian daerah, namun juga bagi perkembangan makro ekonomi nasional. *Kedua*, dominasi kapital terhadap buruh juga dapat menyebabkan mereka hanya menerima proporsi nilai tambah yang kecil. *Ketiga*, sektor finansial yang mendominasi sektor industri menyebabkan akumulasi nilai tambah 'semu', sehingga ekonomi *bubble* terjadi. Hal ini juga menyebabkan proses deindustrialisasi, sehingga menurunkan kemampuan sektor industri nasional dalam menyerap tenaga kerja. *Keempat*, proses pemiskinan dapat terjadi bila sistem persaingan pasar menyebabkan redistribusi kepemilikan aset (misalnya tanah) kepada korporasi. Sementara itu, alokasi anggaran program anti-kemiskinan memiliki keterbatasan akibat efektivitas program yang masih rendah.

### 3. Mobilitas Penduduk dan Persoalan HAM di dalamnya

Migrasi internasional adalah produk dari ekonomi global, dengan polanya yaitu perpindahan tenaga kerja dari negara miskin dengan kapital langka dan tenaga kerja banyak ke negara maju dengan kapital banyak dan tenaga kerja langka. Migrasi internasional antara lain memunculkan gelombang aktivitas jaringan sosial ekonomi yang bersifat regional dan global menjadi semakin marak, terbentuknya interaksi hukum yang bersifat global, dan munculnya segala bentuk aktivitas yang sifatnya 'transnasional'. Dalam konteks migrasi, lapangan transnasional dapat berarti bahwa pergerakan manusia sangat dekat dengan tujuan ekonomi, namun di sisi yang lain juga sangat rentan dengan persoalan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).



Contoh pada kasus moratorium TKI (lihat PSDR LIPI 2011), menyebutkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 pemerintah menetapkan soal kebijakan moratorium tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Selanjutnya, pada 1 Agustus 2011 kebijakan moratorium resmi diberlakukan. Kebijakan moratorium adalah kebijakan penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke suatu negara karena adanya persoalan-persoalan yang belum disepakati antara negara pengirim dengan negara penerima tenaga kerja. Kebijakan moratorium ini diberlakukan untuk menjawab maraknya TKW Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi, mulai dari gaji tidak dibayar, penyiksaan oleh majikan, pelecehan seks, dan hukuman pancung yang dikenakan kepada TKW Indonesia. Pada awal November 2011, Menteri Perburuhan Arab Saudi berkunjung ke Indonesia dan melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Indonesia yang salah satu agendanya soal moratorium TKW sektor informal. Pemerintah Indonesia tetap pada pendirian yaitu menerapkan kebijakan moratorium TKW sektor informal. Namun pihak Pemerintah Arab Saudi belum bersedia menandatangani MOU tersebut dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Arab Saudi belum bergeming dari posisinya untuk lebih bersikap adil dalam struktur hubungan kerja antara majikan dan pembantu rumah tangga. Moratorium TKW sektor informal ke Arab Saudi dari perspektif jangka pendek adalah kebijakan yang berakibat tertundanya keberangkatan pekerja migran dan menghambat peluang usaha PJTKI serta pihak-pihak terkait. Dari perspektif ideal dan jangka panjang kebijakan moratorium merupakan upaya konsolidasi dan perbaikan sistem pengiriman tenaga kerja. Kebijakan ini juga sebagai upaya memperbaiki posisi tawar Indonesia sebagai negara pengirim. Upaya ini dilakukan agar Pemerintah Arab Saudi menandatangani MOU ketenagakerjaan dengan Pemerintah Indonesia.

Pada kasus mobilitas korban penyelundupan manusia juga merefleksikan gambaran besar wilayah atau negara asal mereka pada persoalan-persoalan politik yang sedang berkembang (Pudjiastuti 2010). Persoalan penyelundupan manusia yang masuk kawasan Asia Tenggara meskipun hanya sebagian kecil dari persoalan *displaced people* di dunia, tetapi sudah dapat dikatakan sebagai bagian dari ancaman keamanan negara dan wilayah ASEAN. Bentuk-bentuk ancaman baru telah berkembang dari waktu ke waktu, seperti terorisme, perompakan, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), kejahatan ekonomi internasional, kerusakan lingkungan dan bencana alam. Kehadiran pencari suaka dan juga pengungsi ataupun *stateless* di wilayah negara lain menimbulkan persoalan pelanggaran HAM dan memicu konflik antar negara, yang pada ujungnya menjadi persoalan politik keamanan yang kompleks. Upaya Indonesia untuk dapat tetap menghormati HAM bagi para pencari suaka dan pengungsi tersebut yaitu dengan memperbanyak

dan memperbaiki rumah detensi, membangun kerjasama bilateral dengan berbagai pihak antara kepolisian dan imigrasi Indonesia dengan Australia.

#### 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indonesia kini menghadapi tantangan baru dalam memasuki era globalisasi. Di sisi lain permasalahan internal juga datang silih berganti, isu-isu kritis yang sering muncul adalah adanya keinginan untuk melakukan perbaikan di segala bidang termasuk pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu komponen supra sistem pembangunan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain pembangunan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci pembangunan suatu negara. SDM yang berkualitas adalah modal pembangunan, sehingga strategi pembangunan seharusnya memperhitungkan aspek dari pengembangan SDM, melalui proses pendidikan baik pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Namun, fakta yang ada memperlihatkan bahwa pendidikan konvensional pada saat ini kurang memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang ada malah semakin memperlebar kesenjangan yang ada. Pengembangan SDM di masa depan melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kegiatan belajar yang paling cocok dimasa depan adalah pembelajaran inovatif (*innovative learning*) yang memadukan belajar mengantisipasi (*antisipative learning*) dan partisipasi learning atau belajar bersama orang lain. Pendidikan non formal perlu lebih proaktif dalam mereformasi visi, misi dan strateginya untuk mengubah program-program pendidikan yang sedianya berorientasi pada menghasilkan lulusan sebagai pencari kerja (*worker society*) menjadi upaya menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mandiri dan pencipta lapangan kerja (*employee society*). Oleh karenanya, pengembangan SDM lewat program-program pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mempunyai keterampilan dan citra diri yang positif mengenai keanekaragaman budaya dalam menghadapi era globalisasi (Nagib & Tjiptoherijanto 2008).

#### 5. Globalisasi yang 'Tamak': Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan

John Perkins dalam bukunya, *Confession of an Economic Hitman* mengungkap perselingkuhan korporasi, pemerintah dan intelektual untuk menguasai sebuah negara. Para intelektual-intelektual tersebut mendatangi setiap negara-negara yang baru merdeka; memperkenalkan konsep pembangunan dengan melakukan pembangunan infrastruktur sebanyak-banyaknya, jalan raya, pelabuhan, bandara pembangkit listrik dan lain-lain. Negara-negara

yang kemudian menyetujui hal tersebut diberikan utang dari institusi keuangan global, IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Utang inipun tidak secara gratis diberikan tapi diikuti dengan berbagai persyaratan-persyaratan atau disebut *Structural Adjustment Program*. Program penyesuaian struktural, dimana setiap negara penghutang harus tunduk pada aturan-aturan liberalisme; pengurangan peran negara dalam pengelolaan sumber dayanya, membuka usaha-usaha milik negara untuk dimiliki oleh pihak swasta, privatisasi, merevisi undang-undang yang dianggap menghambat korporasi, deregulasi dan banyak lagi kebijakan-kebijakan lainnya (<http://waiting4caliph.blogspot.com/2010/10/globalisasi-dan-proses-pemiskinan.html> di akses pada tanggal 13 Desember 2011).

Kemiskinan dan pemiskinan global di definisikan sebagai kemiskinan yang di sebabkan oleh globalisasi yang berasal dari pasar bebas dan atau akibat ulah negara maju (Wiranta 2007). Pengalaman Indonesia selama kurun waktu dua dekade terakhir memberikan gambaran bahwa kapitalisme atau membanjirnya modal asing ke Indonesia mempunyai pengaruh yang kurang menguntungkan pihak masyarakat ekonomi lemah. Sejatinya kapitalisme dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dan kesejahteraan penduduk, tetapi kapitalisme juga mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar kelompok negara. Kesenjangan seperti ini merupakan akibat logis dari prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis, di antaranya adalah bahwa sistem ekonomi kapitalis sangat mengutamakan kepemilikan individu. Bahwa kebebasan untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dan pasar bebas merupakan prinsip-prinsip dasar kegiatan ekonomi kapitalis, namun pasar sempurna sebagai persyaratan terwujudnya pemerataan kesejahteraan tidak pernah terjadi. Semua ini akibat adanya praktik-praktik pengejaran kebutuhan ekonomi manusia yang tak terbatas. Perpaduan dari prinsip-prinsip ini dalam kegiatan ekonomi membawa sekelompok masyarakat ke jenjang kesejahteraan atas dasar pengorbanan kelompok lain. Selama tidak dilakukan rekonseptualisasi prinsip-prinsip dasar ekonomi kapitalis, selama itu pula proses pemiskinan masyarakat atau negara lemah oleh negara kapitalis kuat akan terus berlanjut.

Pada tataran praktis, globalisasi – dalam hal tertentu – telah membawa dampak negatif pada lingkungan yang pada gilirannya juga membahayakan keamanan manusia. Saat ini perekonomian global terasa dekat dalam lingkungan pembangunan dimana ‘korporasi’ (perusahaan transnasional) berperan sebagai mesin utamanya. Aktivitas ekonomi terus digenjut demi memenuhi hasrat segelintir orang yang ingin menumpuk keuntungan pribadi dan mengorbankan mayoritas lainnya terkena dampak dari aktivitas mereka. Contoh kasus di sektor pertambangan di kawasan Asia-Pasifik mengindikasikan hal tersebut. Di Cina, Indonesia dan Papua Nugini,

aktivitas pertambangan telah merusak kondisi tanah, mencemari air, udara, danau, pantai dan hutan. Salah satu dampak serius yang ditimbulkan adalah penyakit (pernapasan, jantung, dan kanker paru-paru), keberadaan sumber penghidupan bagi beberapa kelompok masyarakat juga menjadi semakin terancam, dan konflik sosial yang terjadi oleh karena langkanya sumber daya akibat aktivitas korporasi pertambangan terjadi hampir di seluruh tempat. Meski berbagai aturan sudah dikenakan kepada mereka, tetap saja tidak mampu membendung langkah korporasi-korporasi ini mewujudkan kepentingannya yang berujung pada kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pihak yang paling bertanggung jawab atas berbagai persoalan di atas adalah korporasi. Oleh karena itu, penting untuk menagih komitmen mereka untuk membenahi persoalan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan mereka secara langsung dalam setiap konferensi lingkungan global (Amri 2010).

#### *6. Globalisasi dan Ke(tidak)tahanan Budaya*

Pada era global, percampuran antara berbagai budaya tampaknya sulit untuk dihindari, sebagai akibat dari interaksi manusia antar bangsa yang berbeda budaya. Dalam interaksi tersebut, masing-masing akan berusaha mempertahankan budayanya dan berusaha mempenetrasikan kepada bangsa lain. Hal ini bisa dimaklumi, karena budaya merupakan suatu sistem nilai yang memengaruhi cara bertindak dan berpikir seseorang atau masyarakat. Oleh karena itu, di dalam globalisasi di dalamnya terdapat proses hibridisasi. *Hibridisasi* diartikan sebagai suatu cara, dimana suatu bentuk dipisahkan dari kesatuannya (keberadaannya) untuk kemudian digabungkan dengan bentuk lain yang baru. Dalam konsep ini, berarti ada unsur yang dianggap unggul, yang dipindahkan atau diambil dari asalnya, untuk kemudian digabungkan dengan unsur lain (yang juga dianggap unggul). Inilah salah satu isu penting yang ingin di sampaikan dari hasil penelitian Puslit Masyarakat dan Budaya LIPI (Retnowati 2007). Kekuatan globalisasi yang ditopang oleh kekuatan finansial lembaga asing, kekuatan perdagangan bebas, dan kekuatan kebudayaan dunia, kemudian membentuk nilai dan standar etika sesuai dengan kepentingan pemilik modal melalui media global seperti iklan dan lainnya. Oleh karenanya, budaya lokal semakin terancam akibat hegemoni satu arah dari negara maju, padahal negara berkembang memiliki kekayaan lokal. Akibatnya terjadi resistensi yang menolak globalisasi karena moral globalisasi hanya berorientasi pada modal dan keuntungan, sehingga menimbulkan masalah kemiskinan, pengangguran, dan tertutupnya akses rakyat kecil akibat kebijakan pasar bebas. Salah satu contohnya, perusahaan waralaba KFC, McDonalds, dan Pizza Hut yang banyak tersebar di kota-kota Indonesia adalah kepanjangan tangan dari pemilik modal asing dan

pemegang lisensi, sehingga keuntungan tetap mengalir ke mereka. Secara budaya sangat jelas belum memberikan manfaat kecuali membuka akses informasi dan keterbukaan budaya luar negeri bagi masyarakat (Ariwibowo 2007: 55-56).

### **Kompleksitas Masalah dan Tantangan Globalisasi**

Menurut Kamus Merriam Webster (2010) kata globalisasi (*globalization*) pertama kali digunakan pada tahun 1951. Sejak itu, globalisasi lantas didefinisikan sebagai: *the development of an increasingly integrated global economy marked especially by free trade, free flow of capital, and the tapping of cheaper foreign labor markets*. Kata globalisasi memang cenderung dilekatkan pada aktivitas ekonomi (Amri 2010: 2). Lebih jauh, beberapa sarjana kemudian mengidentikkan globalisasi dengan dinamika kapitalisme global (Waters 1995; Anderson et. all 1995; dan Marshall 1999) yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengakumulasi modal ekonomi sebanyak-banyaknya tanpa mengenal batas dan wilayah. Waters (1995: 5) misalnya, merujuk aspek ekonomi sebagai kekuatan utama pendorong globalisasi di samping politik, sosial, dan budaya. Demikian pula dengan Anderson, Brook, dan Cochrane (1995) yang juga menitikberatkan aktivitas ekonomi sebagai pilar utama globalisasi. Dalam bukunya yang berjudul *A Global World? Re-Ordering Political Space*, ketiganya meletakkan ekonomi sebagai faktor utama pengubah tatanan politik dunia. Pun halnya dengan Marshall (1999) yang mengatakan bahwa era globalisasi dipengaruhi secara kuat oleh motif-motif ekonomi dari para agen kapitalis global. Agen kapitalis global ini, lanjut Marshall, dimotori oleh korporasi transnasional yang hadir paska Perang Dunia II. Dengan dibantu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang berhasil mengubah tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin, aktivitas ekonomi korporasi transnasional tersebut menjadi semakin lancar. Perlahan-lahan akhirnya kekuasaan negara diintervensi, atau bahkan dilemahkan.

Globalisasi tampaknya merupakan suatu fenomena yang luas, namun sebenarnya dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, misalnya, globalisasi dibidang ekonomi bisa dilihat dalam isu perdagangan bebas. Rejim perdagangan dunia WTO membicarakan soal kebijakan perdagangan internasional, khususnya perdagangan bebas. Produk barang dan jasa diharapkan mudah bergerak dari negara lain tanpa memperoleh hambatan baik tarif maupun nontarif. Globalisasi dibidang politik dan ideologi bisa dipahami dari berkembang isu demokratisasi dan HAM. Semangat demokratisasi yang terjadi disuatu kawasan bisa menular ke kawasan lain. Isu demokratisasi di Eropa Timur menumbangkan rejim komunis yang otoriter satu demi satu. Globalisasi dibidang budaya bisa dikaitkan dengan gaya hidup yang ada di suatu kawasan diikuti oleh suatu masyarakat di kawasan

lain. Misalnya budaya populer AS diikuti oleh sebagian masyarakat di tempat lain. Hal ini bisa dilihat dari maraknya masyarakat menikmati McDonald, Coca Cola, Kintucky Fried Chicken. Mode pakaian bergaya *Blue Jeans* yang disukai kaum muda AS, seperti *Levi's* juga disenangi oleh masyarakat di negara lain (Siswanto 2010: 1-8).

Selain beberapa hal di atas, tampaknya kita perlu juga memperhatikan munculnya beberapa isu lain seperti; *global governance* yang mengatur berbagai kecenderungan globalisasi yang telah mendorong terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Dalam bidang perdagangan, pemerintah nasional Indonesia adalah anggota dari WTO yang terikat dengan aturan-aturan yang diratifikasi di dalamnya. Dalam hal perburuhan kita juga adalah anggota ILO (*International Labor Organization*) yang semakin memperhatikan prinsip-prinsip penerapan HAM dalam kehidupan kaum buruh. Demikian pula, dalam isu-isu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain (Arfani 2010: 1).

Sejak kemunculannya, globalisasi telah secara perlahan merombak pola relasi antar aktor dalam hubungan internasional. Dahulu, orang hanya bisa terhubung dengan orang lain di sekitarnya. Tetapi, seiring dengan perkembangan alat komunikasi dan transportasi, hubungan antar manusia semakin meluas melintasi batas-batas wilayah. Bersamaan dengan itu, negara-negara di dunia juga kian meningkatkan hubungannya. Proses globalisasi yang di satu sisi melemahkan peran negara, namun di sisi lain menguatkan peran masyarakat internasional. Di era sekarang, internasionalisme yang lebih menekankan peran negara dihadapkan secara diametral dengan globalisasi yang kadang kala menisbikan peran negara (Mubah 2010: 1).

Dari beberapa perspektif ide maupun praktis yang tercakup dalam tema globalisasi di atas, globalisasi sendiri di hadapkan pada kompleksitas masalah dan tantangan. Secara umum, kompleksitas ini dapat di uraikan dalam tiga pemahaman; *pertama*, globalisasi tidak bisa dihindari, namun bagaimana mengurangi dampak negatif bagi kepentingan setiap aktor, terutama bagi setiap warga negara, baik secara ekonomi maupun politik, keamanan dan kebudayaan. *Kedua*, dampak globalisasi yang terjadi di tingkat regional dan nasional terhadap masyarakat, pemerintah dan pasar/pelaku ekonomi. *Ketiga*, masalah penataan struktur dan pola hubungan antar para aktor yang lebih simetris yang bekerja dalam ranah globalisasi. Atau dengan kata lain, luntarnya batas negara yang bergiat di bidang globalisasi ekonomi dapat membangun suatu kekuatan negara, kelompok masyarakat atau korporasi perusahaan transnasional. Penjelasan mengenai ketiga persoalan ini akan di uraikan sebagai berikut:

1. Dari berbagai kecenderungan isu globalisasi di atas, paling tidak terdapat dua aspek yang mengemuka dalam globalisasi dan pola relasi di dalamnya yakni adanya aktor yang berperan dalam gerak globalisasi dan konsep status/peran yang mengikutinya. Hubungan aktor/pelaku dan status/peranan ini tentunya mempunyai implikasi terhadap 'perilaku' atau 'cara-cara mempengaruhi/menguasai' subyek yang ingin mereka kuasai. Seperti telah diketahui bahwa wacana aktor dalam globalisasi telah meninggalkan dikotomi aktor negara dan aktor non-negara. Dalam kaitan globalisasi, di mana jaringan aktor-aktor melibatkan pelaku mulai dari tingkat lokal sampai global, kini sebagian orang semakin cenderung menggunakan istilah "aktor transnasional" daripada "aktor non-negara" (Marut 2010: 1-2). Perubahan pada aktor diindikasikan dengan perubahan (bertambah atau berkurangnya) jumlah dan sifat aktor hubungan internasional. Selain negara, aktor transnasional ditandai oleh kelompok-kelompok seperti *Multi national Corporations (MNCs)*, *International Governmental Organizations (IGOs)*, *International non Governmental Organizations (INGOs)* dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional dan *Transnational Organized Crime (TOC)* (Yani 2010: 3-4). Selanjutnya dijelaskan bahwa interaksi yang dihasilkan oleh IGOs dan NGOs semakin rumit dikarenakan keterkaitan mereka dalam beragam isu yang begitu luas seperti perdagangan internasional, pertahanan, pelucutan senjata, perdamaian dunia, pembangunan sosial budaya, kesehatan, pengungsi, lingkungan hidup, pariwisata, perburuhan dan juga kampanye terhadap penghapusan perdagangan narkoba. Aktivitas hubungan transnasional dari berbagai aktor non-negara ini kemudian memunculkan konsep *international society* (masyarakat internasional) yang pada intinya merupakan interaksi antar individu atau kelompok yang melewati batas-batas tradisional negara. Namun demikian, masih banyak teoritis hubungan internasional yang mengakui bahwa aktor negara masih menjadi aktor yang sangat dominan dalam hubungan internasional sebagaimana dinyatakan Charles Beitz bahwa "*nation states are the most important actors for understanding international relations*" (Yani 2010: 3-4).
2. Dalam tata kelola ekonomi global, liberalisasi perdagangan dan investasi adalah salah satu faktor pendorong proses percepatan akumulasi kapital (Tim Peneliti P2E LIPI 2010: 3). Hal ini menjadi masalah pula dalam proses globalisasi terutama dalam bidang ekonomi. Strategi liberalisasi perdagangan dan investasi ini diyakini akan meningkatkan volume perdagangan dan investasi global, nasional maupun lokal-sehingga dengan proses harmonis yang terjadi-akan menghasilkan akumulasi kapital pada setiap pelaku ekonomi. Setiap pelaku ekonomi menggunakan kekuatan (*power*) yang dimiliki untuk mencapai maksimisasi manfaat

(seperti akumulasi kapital) dan memperoleh/ memperkuat kekuatan pasar (*market power*) dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Karena itu, dapatlah dipahami bahwa liberalisasi sebagai suatu 'ideologi' berusaha diimplementasikan sebagai upaya memperkuat kekuatan pasar terutama bagi kapitalis raksasa seperti perusahaan transnasional (MNCs) dengan dukungan pemerintahnya. Dukungan ini bukan hanya dari sisi finansial tetapi juga non-finansial, termasuk pemahaman akademis, bantuan asing maupun pengaruh politik dan sebagainya.

3. Abstraksi lain mengenai kritik masalah terhadap proses globalisasi adalah pandangan mengenai keberhasilan mengintervensi dan melemahkan kekuasaan negara yang tidak melulu bukan semata-mata hasil upaya korporasi transnasional. Menurut Robinson (1996), terdapat agen ekonomi supranasional, forum-forum politik tingkat tinggi dunia, serta elit-elit transnasional yang gencar mengampanyekan perlunya meminimalisasi peran negara. Mereka kemudian menciptakan ketergantungan negara-negara Selatan yang tertinggal terhadap negara-negara Utara yang maju melalui utang dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di negara Selatan itu sendiri. Dalam perkembangannya, akibat ketidakmampuan mengelola keuangan, negara-negara peminjam (Selatan) ini mengalami kegagalan percepatan ekonomi sehingga tidak mampu membayar hutang. Akibatnya, mereka pun 'dipaksa' untuk menerima skenario yang bernama Program Perbaikan Struktural (*Structural Adjustment Program*) yang intinya mengharuskan mereka untuk melakukan liberalisasi ekonomi, menderegulasi sektor keuangan, dan melakukan privatisasi atas sumberdaya alam, industri, perbankan, dan sektor publik lainnya (Casanova 1996). Dengan demikian, negara-negara peminjam ini semakin dibuat tidak berdaya dengan aksi-aksi aktor-aktor globalisasi di atas.

Dengan ketidakberdayaan negara-negara ini mengakibatkan aktor (korporasi) transnasional menemukan peluangnya untuk semakin bebas beraksi. Perlahan tapi pasti mereka menggerogoti sumberdaya alam negara-negara Selatan tersebut yang pada gilirannya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Studi mengenai hubungan antara globalisasi—aktivitas korporasi transnasional—dan kerusakan lingkungan ditunjukkan oleh Lofdahl (2002: 8-9) dan Broswimmer (2002). Menurut Lofdahl, aktivitas ekonomi global saat ini telah jauh dari yang dicita-citakan. Alih-alih ingin memperjuangkan pemerataan kemakmuran, harmoni sosial, sembari menjaga kelestarian lingkungan, korporasi transnasional malah melakukan sebaliknya. Aktivitas ekonomi global justru membawa dampak negatif, salah satunya, pada kelestarian lingkungan. Misalnya, negara-negara Utara yang maju telah memindahkan ladang produksinya ke negara-negara Selatan yang tertinggal. Akibatnya, kondisi lingkungan negara-negara Selatan menjadi terpuruk.



4. Sejalan dengan point 3 di atas, masalah globalisasi muncul melihat keterkaitan antara aktivitas ekonomi global dengan rusaknya lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari dominannya paradigma pasar bebas, yang dianggap tamak (*greedy*) dan eksploitatif terhadap alam, dalam percaturan ekonomi global. Hal tersebut semakin diperparah oleh pola konsumsi warga bumi yang berlebihan, di samping kian bertambahnya jumlah penduduk dunia. Tidak heran mengapa kemudian Broswimmer (2002) menyebut abad ini sebagai periode kemusnahan ekologis (*the period of Ecocide*) karena berbagai indikasi telah muncul mulai dari persoalan lingkungan, dari yang sederhana, semisal pencemaran lingkungan, hingga yang paling kompleks, seperti perubahan iklim. Berbagai persoalan lingkungan ini diyakini bermuara pada keamanan manusia (*human security*)<sup>4</sup>.

Beberapa persoalan keamanan manusia yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan sangat berpotensi mengakibatkan kelangkaan sumberdaya, konflik, dan penyakit kronik. Studi yang dilakukan oleh Rosegrant dkk (2002: 7) menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akan berdampak pada kelangkaan pangan di masa depan. Mereka pun memprediksi bahwa dalam waktu dekat akan terjadi penurunan jumlah hasil panen para petani sebesar satu persen hingga beberapa dekade ke depan. Serupa dengan ini, studi Rosegrant dan Cline (2003: 1917) juga menunjukkan betapa degradasi lingkungan yang terjadi belakangan ini berdampak nyata pada kelangkaan sumberdaya pangan (*food scarcity*) khususnya di negara-negara Selatan yang terbelakang. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tidak menentu yang kemudian mengganggu aktivitas bercocok tanam di negara-negara tersebut.

5. Dalam bidang kebudayaan, keistimewaan kondisi sosial dewasa ini dengan segala macam perangkat komunikasi dan informasi mutakhir

---

4 Ada beberapa sarjana yang mendefinisikan konsep keamanan manusia, di antaranya adalah MacLean (1999); Newman (2001); King dan Murray (2002). Menurut MacLean keamanan manusia merupakan perlindungan terhadap individu atas ancaman politik dan perlindungan untuk memperoleh kesempatan hidup sejahtera. Ancaman politik yang dimaksud dapat berupa kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain sementara kesempatan hidup sejahtera tercermin pada aksesibilitas manusia terhadap lingkungannya. MacLean mendefinisikan keamanan manusia ini sebagai keamanan atas diri pribadi, komunitas, dan lingkungan. Sementara itu, Newman mendefinisikannya sebagai bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Adapun King dan Murray mendefinisikan keamanan manusia sebagai keamanan yang berpusat pada manusia sebagai individu. Pandangan para sarjana ini kemudian turut mengubah pengertian mengenai konsep keamanan itu sendiri yang sebelumnya berpusat pada negara atau teritori tertentu dan cenderung bernuansa politik menuju manusia atau individu yang melihat kerusakan lingkungan juga sebagai ancaman. *Human security* di sini dapat diartikan peningkatan peran dan perhatian individu dibandingkan sebelumnya yang lebih fokus pada negara/masyarakat. Perubahan ini juga dibarengi dengan sejumlah masyarakat yang membutuhkan tindakan bersama (*collective action*) yang berbeda (persoalan lingkungan hidup). Fenomena *collective action* dan individu ini menunjukan ciri yang unik ketika dibarengi dengan tingginya penggunaan internet yang menjadikan peran individu menjadi lebih berarti berkat wahana jejaring sosial yang semakin marak sekarang ini.

bukan terletak pada kadar maupun intensitas proses globalisasi, tetapi pada kejelasan, keterbukaan, dan sifat “kasat mata” pengaruh berbagai macam kebudayaan dunia yang masuk dalam ranah kehidupan manusia (Alam 1998: 1-11). Dalam konteks ketahanan budaya atau pelestarian budaya dalam era globalisasi, masih banyak yang mengkhawatirkan bahwa budaya akan hilang seiring dengan berkembangnya proses globalisasi. Namun, menilik pada sifat/kodrat kebudayaan itu sendiri yang bersifat dinamis, cair dan hibrid (dan) dengan menghindari serta mengkritik representasi budaya yang bersifat esensialis dan statis, maka kita pun seharusnya menjadi paham bahwa proses globalisasi dan perubahan budaya sesungguhnya tak pernah absen dari kehidupan sosial manusia. Mengutip ahli antropologi Lévi-Strauss, identitas atau jati diri para pendukung suatu kebudayaan menjadi kuat bukan karena isolasi tetapi justru karena adanya interaksi antara budaya. Dalam proses globalisasi tak perlu menjadi kekhawatiran berlebihan yang menjurus pada *xenophobia*, justru yang terpenting adalah bagaimana memahami proses perubahan kebudayaan itu sendiri yang sering luput dari perhatian (Alam 1998: 1-11).

6. Kecenderungan terakhir dari globalisasi adalah regionalisme. Artinya, bahwa saat ini para pengusaha multi nasional mulai mengalami kemandegan karena sumber daya yang kian terbatas. Strategi yang dilakukan salah satunya adalah mereka mulai masuk ke suatu wilayah atau region, pengelompokan beberapa negara. Strategi ini diikuti pula oleh pengusaha kecil dan menengah yang sering kesulitan melawan globalisasi. Jalan sama yang ditempuh adalah membentuk regionalisasi, kerjasama ekonomi antara beberapa daerah. Kerjasama dapat terjadi sebagai kerjasama antara beberapa daerah dalam suatu negara, antar negara, atau kedua-duanya. Otonomi regional tidak berarti tiap daerah bekerja sendiri-sendiri dan melupakan keterkaitan dan kerjasama dengan daerah lain (Ananta 2008). Dengan kata lain, regionalisasi tampaknya merupakan salah satu cara menarik untuk meningkatkan perekonomian, baik dari sisi pengusaha multi-nasional mau pun pengusaha menengah dan kecil. Menjadi menarik, bila kita memikirkan paradigma pembangunan dalam konteks regionalisasi dan globalisasi. Salah satu contoh pemikiran yang perlu dikaji lebih jauh dan lebih mendalam adalah ‘kemungkinan’ melakukan *Borneo Regional Economic Cooperation*, meliputi semua propinsi ke Kalimantan, Sabah dan Serawak di Malaysia, dan Brunei. Dalam kaitan dengan globalisasi, salah satu tantangan yang kini banyak dialami di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah adanya gejala “*global consumers, local earners*”. Masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa dengan standar dunia dan harga dunia, tetapi masyarakat masih berproduksi lokal. Untuk negara seperti Jepang, gejala ini

menguntungkan karena harga dan gaji mereka tinggi untuk ukuran dunia. Untuk negara seperti Indonesia, gejala ini membuat orang Indonesia mengalami kesulitan dalam persaingan internasional (Ananta 2008).

**Tabel 1:** Rekapitulasi Masalah dan Tantangan Globalisasi di Indonesia.

No	Masalah	Identifikasi Tantangan
1	“aktor transnasional” selain “aktor non-negara”	Selain negara, aktor transnasional kini ditandai oleh kelompok-kelompok seperti <i>Multi national Corporations (MNCs)</i> , <i>International Governmental Organizations (IGOs)</i> , <i>International non Governmental Organizations (INGOs)</i> dan kelompok teroris internasional dan <i>Transnational Organized Crime (TOC)</i> → melahirkan konsep <i>international society</i>
2	Percepatan akumulasi kapital	Liberalisasi sebagai suatu ‘ideologi’ menggabungkan kekuatan korporasi dengan pemerintah dalam bentuk finansial dan non-finansial (pemahaman akademis, bantuan asing maupun pengaruh politik dsb)
3	Intervensi dan pelemahan kekuasaan negara	Peran ini dilakukan gabungan korporasi transnasional dan agen ekonomi supranasional, forum-forum politik tingkat tinggi dunia, serta elit-elit transnasional
4	Bencana kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsekuensi dari dominannya paradigma pasar bebas</li> <li>- Penduduk yang semakin banyak</li> <li>- Pola konsumsi</li> <li>- Pencemaran lingkungan</li> <li>- Perubahan iklim</li> <li>- Kelangkaan pangan di masa depan</li> </ul>
5	Keamanan manusia ( <i>human security</i> )	Peningkatan peran dan perhatian individu pada negara/masyarakat melalui tindakan bersama ( <i>collective action</i> ) agar terhindar dari ancaman politik, bencana kerusakan lingkungan,

		dan mendapatkan perlindungan untuk memperoleh kesempatan hidup sejahtera
6	Ketahanan budaya atau pelestarian budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekhawatiran bahwa budaya akan hilang seiring dengan berkembangnya proses globalisasi</li> <li>- Pemahaman proses perubahan kebudayaan itu sendiri yang sering luput dari perhatian</li> </ul>
7	Regionalisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kecenderungan pengusaha multi nasional mulai mengalami kemandegan beroperasi karena sumber daya yang kian terbatas</li> <li>- Jalan yang ditempuh adalah membentuk regionalisasi, kerjasama ekonomi antara beberapa daerah dalam suatu negara, antar negara, atau kedua duanya</li> <li>- Regionalisasi tampaknya merupakan salah satu cara menarik untuk meningkatkan perekonomian, baik dari sisi pengusaha multi-nasional mau pun pengusaha menengah dan kecil</li> </ul>

*Sumber:* data di olah dari berbagai sumber

### **Kebijakan ‘Setengah Hati’ Terkait Globalisasi**

Globalisasi seperti gambaran di atas tampak sebagai sesuatu yang menakutkan, namun bisa juga sekaligus tantangan. Ada yang menilai merasakan keuntungan besar dari globalisasi, tetapi bagi sejumlah pandangan lain melihat globalisasi justru dinilai sebagai ancaman. Namun, seperti di katakan Hadi Soesastro (2004: 8) bahwa kenyataan globalisasi itu sulit di hindari, bahwa dalam kurun saat ini telah banyak yang telah terjadi, baik di belahan dunia, di kawasan Asia, atau di Indonesia sendiri. Pada tingkat global dan regional proses integrasi telah semakin laju. Yang melintasi batas-batas negara bukan hanya arus barang dan jasa, orang, uang dan modal, tetapi juga teknologi, informasi, dan bahkan juga gagasan. Dunia telah menjadi satu. Kesemua jenis arus itu sulit dibendung masuk atau keluar. Kemajuan teknologi bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan dan dalam perkembanganya hambatan-hambatan itu sendiri kini dapat semakin

dikurangi. Globalisasi dalam hal ini lantas menyisakan pekerjaan rumah baik bagi pemerintah maupun masyarakat<sup>5</sup>. Pemaparan berikut ini menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait dengan persoalan-persoalan globalisasi, namun hanya 'beberapa' saja yang dapat dimasukkan karena keterbatasan data yang dimiliki.

Terkait dengan soal kebijakan terhadap masalah globalisasi ini, salah satu strategi terhadap globalisasi yang dapat di baca dari paparan di atas adalah proses deregulasi dan liberalisasi ekonomi, kerjasama ekonomi regional dan pembentukan *political union*. Pemerintah Indonesia dalam hal ini sedikit banyak menerapkan pola strategi yang sama. Yang paling kentara adalah strategi liberalisasi melalui berbagai deregulasi di sektor perdagangan, investasi dan keuangan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak jaman Orde Baru. Revisi UU penanaman modal tahun 2007, salah satunya contohnya, memberi ruang gerak kepemilikan asing yang semakin besar, mulai dari 60% hingga 99%.<sup>6</sup> Model pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pemerintah yang mendukung liberalisasi perdagangan di satu sisi mempercepat akumulasi kapital, tetapi di sisi lain dapat menghasilkan pemiskinan. Sebagai contoh, dominasi korporasi pada sektor retail di atas menunjukkan pola persaingan yang tidak sehat, antara si kaya (perusahaan besar) dan si miskin (pedagang kecil). Akibatnya, marginalisasi pedagang kecil di pasar tradisional mengindikasikan terjadinya proses pemiskinan. Demikian pula halnya terjadi di sektor keuangan perbankan dan investasi.

Diterapkannya kebijakan deregulasi dan liberalisasi ekonomi melalui penanaman modal asing, 'salah satunya' adalah pengaruh tidak langsung dari keikutsertaan Indonesia dalam percaturan kerjasama ekonomi dan kerjasama regional. Misalnya, Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya memutuskan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Proyek ini yang dikenal sebagai program AFTA atau *ASEAN Free*

---

5 Menurut Stiglits (2006) dalam bukunya *Making Globalization Work* menyatakan ada 6 pekerjaan penting yang harus dilakukan, yaitu: (1) perhatian terhadap upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan; (2) perlunya bantuan asing dan pengurangan utang; (3) perdagangan yang adil; (4) liberalisasi perdagangan dan pasar modal; (5) perlindungan terhadap masalah lingkungan; dan (6) pemerintahan yang bersih, di kutip Carunia Mulya Firdausy (peny). 2006. *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Globalisasi. Di Sektor Industri Manufaktur*. P2E LIPI, Jakarta. Hlm iii.

6 Sebagai contoh untuk skala hypermarket, dominasi kekuatan pasar berada ditangan Carrefour dengan penguasaan omset sebesar 48.70%, kemudian disusul oleh Hypermart, Giant dan Makro dengan porsi omset masing-masing sebesar 22.08% dan 17.75% dan 9.52%. Dari sudut pandang strategi *pro-growth*, struktur pasar monopolistik menguntungkan karena akan mampu menciptakan profitabilitas yang besar sehingga akan memperbesar akumulasi capital, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, struktur pasar monopolistik di sektor retail berpotensi memarginalisasikan pedagang kecil dan pasar tradisional, dimana mayoritas penduduk miskin dengan usaha kecilnya melakukan aktifitas bisnis. Keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam laporan hasil penelitian Tim Peneliti P2E LIPI. 2010. *Liberalisasi, Dominasi Asing dan Kemiskinan Di Indonesia*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 pada tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan; dan laporan penelitian P2E-LIPI. 2009. *Dominasi Asing Dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta P2E-LIPI.

*Trade Area* yang diluncurkan pada Januari 1993 dan direalisasikan 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2008 namun pada tahun 1998 diputuskan kembali oleh kelompok anggota ASEAN ini untuk mengajukan percepatan realisasi AFTA menjadi 1 Januari 2002. Selain AFTA, pada tahun 2002 melalui KTT ASEAN-Cina, Indonesia juga turut menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and PRC* sebagai cikal bakal pembentukan *China ASEAN Free Trade Area (CAFTA)* yang telah diberlakukan efektif pada 1 Januari 2010. AFTA dan CAFTA adalah jawaban terhadap globalisasi dan regionalisasi sekaligus, yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari liberalisasi ekonomi. Kesepakatan ini adalah keputusan bersama, namun sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai contoh, Indonesia kini dibanjiri barang-barang murah buatan Cina dan terlebih lagi barang-barang tidak resmi banyak tersedia di pasaran. Barang-barang yang diimpor dari Cina sebagian besar berupa perkakas listrik, mesin, produk besi baja, tekstil, keramik, plastik, makanan olahan, garmen, kerajinan tangan, pupuk, aluminium, produk makanan dan minuman, serta produk laut. Tidak hanya barang-barang dari negara Cina, dari sesama negara-negara ASEAN pun menunjukkan keadaan yang sama. Tekanan impor barang negara lain tentu saja mengganggu ekonomi Indonesia, terutama daya saing produksi dalam negeri yang memiliki kemiripan dengan barang-barang impor (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/02/1153057/Perdagangan.Indonesia-China> di akses pada 14 Desember 2011).

Paskapenandatanganan kesepakatan AFTA maupun CAFTA, pemerintah RI juga telah mengadopsi kebijakan pangan yang sangat berorientasi pro pasar bebas (*free-market*). Beberapa bentuk kebijakan yang telah diambil antara lain: penghapusan dan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditi pangan yang merupakan bahan pokok (beras, terigu, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh, dll.), dan pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan bahan pangan (contohnya merubah BULOG dari lembaga pemerintah non-departemen menjadi perusahaan umum yang dimiliki pemerintah). Kebijakan ini secara tidak langsung akan membuat impor barang pertanian/supply produk pertanian menjadi semakin besar. Pasar pangan Indonesia yang cukup besar memang banyak di incar oleh produsen pangan luar negeri. Diterbitkannya Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pembebasan tanah bagi kepentingan umum, ini berkaitan dengan tujuan untuk memudahkan investasi asing, dan semakin mempersempit ruang gerak pertanian dalam negeri tampaknya turut memperburuk kondisi pertanian Indonesia secara umum (Firdausy 2005). Kenyataan ini juga terjadi pada industri manufaktur terutama dalam era globalisasi yang semakin menunjukkan kerapuhannya. Kerapuhan industri manufaktur tidak hanya terjadi pada industri padat karya seperti industri alas kaki dan tekstil, juga terjadi pada industri padat modal (otomotif, mesin, elektronika, dan semen)

(Firdausy dkk 2006). Penyebabnya dipengaruhi beberapa faktor; selain daya saing, produktifitas dan rendahnya investasi menjadi sumber penyebab utama. Beberapa paket kebijakan (industri maupun investasi; PP 20 tahun 1994, UU No 22 tahun 1999, dan INPRES No 3/2006) yang cukup memadai namun kurang ditunjang oleh komitmen dalam pelaksanaannya, sehingga globalisasi ekonomi yang terjadi justru malah mengakibatkan kecenderungan penurunan pada sektor industri manufaktur (Firdausy dkk 2006).

Sementara itu kebijakan globalisasi lain, misalnya, dalam bidang pengelolaan SDA di Indonesia juga tidak luput dari masalah. Kisah mengenai datangnya korporasi transnasional pertambangan dimulai dari naiknya Suharto sebagai pemimpin pada tahun 1966. Pemerintahan Suharto mula-mula menyiapkan perangkat hukum datangnya korporasi tersebut, sebagaimana pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-undang (UU) No. 1/1967 berisi tentang investasi luar negeri. Tidak lama berselang, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 11/1967 yang khusus mengatur sektor pertambangan. Dengan dua perangkat hukum ini, pemerintah kemudian membuka kesempatan yang sangat luas kepada korporasi transnasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Adapun korporasi yang pertama kali memperoleh kontrak karya (*Contract of Work*) dari pemerintah adalah Freeport dan mulai beroperasi pada tahun 1972 (Ballard 2001: 13&23). Selanjutnya menyusul Rio Tinto (Australia), Inco (Kanada), dan Newmont (Amerika). Kerja korporasi internasional ini semakin mudah dengan diberlakukan perijinan kontrak karya bagi mereka. Sebagai contoh, UU No. 4/2009 mengenai mineral dan batu bara hanya dirancang untuk meningkatkan pendapatan pemerintah namun tidak mengoreksi keberadaan korporasi global yang telah membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Terbukti, pasal 169 menyatakan bahwa korporasi yang telah memegang Kontrak Karya tetap memiliki hak untuk beroperasi hingga masa kontraknya berakhir. Dengan demikian, sangat terbuka kemungkinan akan timbulnya kerusakan lingkungan yang lebih parah dan mengancam keamanan manusia Indonesia di masa depan.

Kebijakan paling rumit terkait globalisasi adalah kebijakan menyangkut budaya, mungkin karena sulit dijabarkan. Misalnya masalah kepemilikan budaya. Pada tanggal 2 Oktober 2009 batik telah di tetapkan oleh UNESCO sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Namun bila mencermati soal kepemilikan budaya Indonesia masih banyak bermasalah, yang paling kentara sekali adalah klaim produk budaya dari Malaysia. Malaysia mengklaim dan mempatenkan batik motif "Parang Rusak", angklung, wayang kulit hingga rendang, kemudian lagu yang sangat mirip "Rasa Sayang" menjadi *soundtrack* iklan pariwisata Malaysia yang dicurigai diambil dari lagu "Rasa Sayange" dan lagu "Indang Bariang" yang juga digunakan untuk iklan merupakan lagu asal daerah Sumatera. Klaim Tari Barongan sebagai warisan dari Batu Pahat,

Johor dan Selanggor Malaysia padahal Tari Barongan yang sangat mirip Reog Ponorogo sementara Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan Reog Ponorogo dan mendapatkan Hak Cipta No.026377 pada 11 Februari 2004. Ada pula klaim Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Melayu dengan slogan mereka “Bahasa Melayu adalah Bahasa Malaysia”, dan terakhir Tari Pendet menjadi iklan acara Discovery Channel bertajuk “Enigmatic Malaysia”. Berkaitan dengan persoalan sengketa budaya ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta *Eminent Persons Group* (EPG) agar difungsikan lebih baik untuk mencegah terulangnya kasus serupa. EPG yang dibentuk tahun 2006 bertujuan mengelola sengketa kedua bangsa, termasuk isu hak cipta, karya budaya, karya peradaban dan lain-lain (Saiman 2009).

Dan terakhir, terkait isu migrasi internasional tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tahun 1999 ditetapkan KEPPRES No. 29 tentang *Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia* (BKPTKI). Badan ini bersifat lintas sektoral dan terkait dengan sembilan instansi yang berhubungan dengan TKI atau buruh migran. KEPPRES ini sebagai respon dari pemerintah atas semakin banyak masalah yang dihadapi oleh TKI atau buruh migran saat bekerja di luar negeri. Sedangkan, di daerah khususnya di tingkat Propinsi dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). Hal ini merupakan pelayanan agar proses pengurusan dokumen bagi calon buruh migran lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Disamping itu, badan ini juga memberi perlindungan bagi calon TKI dan TKI purna yang kembali ke Indonesia. Selanjutnya untuk menyikapi perkembangan dinamika tenaga kerja luar negeri pemerintah melakukan revisi dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Perpres No 61. tahun 2006. BNP2TKI ini sekaligus secara yuridis adalah melaksanakan perintah UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Diharapkan kebijakan ini dapat menyentuh segi pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Laporan PSDR LIPI 2009: 25-28).

Sebagai catatan penutup, pemerintah Indonesia sejauh ini tidak memiliki visi dan strategi khusus dalam menghadapi globalisasi. Tampaknya pemerintah masih memaknai globalisasi hanya sebatas selayang pandang, belum pernah diurai bagaimana peluang dan tantangannya dalam bentuk praktis dalam kebijakan. Beberapa aspek seperti: bagaimana penjelasan pemahaman mengenai perkembangan dan dampak globalisasi bagi peradaban umat manusia bagi masyarakat Indonesia melalui media oleh pemerintah; kemudian mengenai pemetaan aktor (pelaku globalisasi), apa saja kepentingan yang saling di harapkan dan hubungan antar aktor negara dan non-negara dalam dinamika proses globalisasi tidak terjelaskan dengan tuntas dalam rumusan kebijakan yang mengatur hak dan kewajiban mereka terutama bagaimana mengenai penataan hubungan antar aktor di level nasional, regional dan



global. Tidak adanya dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah sebagai acuan dalam menghadapi era globalisasi menyebabkan miskinnya analisis dan uraian memadai dalam rencana pembangunan (misalnya dalam RPJM/RPJP sebagai panduan bagi pemerintah dan masyarakat) yang membahas globalisasi.

### **Penutup: Index dan Strategi Globalisasi**

Dalam indeks globalisasi tahunan yang dikeluarkan AT Kearney/Foreign Policy 2003-2006, posisi Indonesia tidak berubah, yakni peringkat ke-3 dari belakang (*least globalized country*). Indonesia menduduki urutan 60 dari 62 negara. Peringkat atas (*most globalized country*) ditempati negara maju, seperti Singapura, Swiss, Denmark, Kanada, AS, Australia, dan Inggris. Indeks ini diukur melalui indikator ekonomi, politik, teknologi, dan personalitas. Dalam integrasi ekonomi, Indonesia pada urutan ke-52, kontak personal ke-59, koneksitas teknologi ke-51, dan kesepakatan politik ke-50. Tak jauh beda dengan indeks AT Kearney, indeks globalisasi KOF juga mengukur dimensi ekonomi, sosial, dan politik globalisasi. Hanya saja, KOF mengukur indeks globalisasi dengan jumlah negara lebih banyak dan dalam kurun waktu lebih lama. Dalam daftar indeks globalisasi KOF 2007, posisi Indonesia pada urutan 78 dari 122 negara. Peringkat globalisasi ini didasarkan pada data tahun 1970 hingga 2004 dengan 25 variabel (Cahyono 2007). Index ini mengukur globalisasi sektor ekonomi karena memang lebih dominan dibandingkan dengan dimensi lain, selain itu juga karena dampaknya nyata dan signifikan.

Terkait dengan index posisi globalisasi Indonesia, sejauh ini memang sangat diperlukan pengembangan riset dan teknologi untuk menunjang aturan main dan ketersediaan informasi mengenai globalisasi di masa depan. Hal ini disebabkan posisi negara dan masyarakat memang masih rendah ketika berhadapan dengan kekuatan global. Ibarat Mike Tyson (dulu sebagai juara kelas berat) melawan Chris John (juara kelas ringan), menempatkan Indonesia dalam kompetisi yang tidak pada levelnya. Sebenarnya sudah banyak lembaga riset yang melakukan terobosan dalam konteks ancaman globalisasi semisal menciptakan pola daya saing lokal terhadap gempuran perusahaan asing, di antaranya adalah Puslit Ekonomi dan Politik IPSK LIPI atau *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS). Rekomendasi yang diberikanpun sudah sangat baik, mendorong strategi orientasi globalisasi yang sudah ada (dari *state security* ke *human security*) untuk lebih mendukung kepentingan (kesejahteraan) bagi masyarakat banyak. Hal ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah agar memiliki 'visi' tentang globalisasi. Studi/kajian yang komprehensif dan kerjasama lintas lembaga penelitian tentang perkembangan globalisasi dan dampaknya di tingkat regional dan nasional

penting untuk dilakukan terutama oleh Kedepatian IPSK LIPI yang membidangi masalah-masalah sosial di Indonesia.

Selain penelitian dan pengembangan untuk memperkuat visi globalisasi, penataan kelembagaan juga tidak boleh diabaikan dalam mendesain kebijakan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah program peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk pemerintah, masyarakat dan pasar/pelaku ekonomi. Dengan perkembangan masalah (politik, keamanan, ekonomi, sosial dan kebudayaan), penambahan jumlah aktor (aktor negara dan non-negara) maupun kompleksitas pola relasi antar para aktor, baik di tingkat global, nasional maupun lokal, maka kemampuan setiap aktor harus ditingkatkan secara proporsional. Tujuan utamanya agar mampu memahami setiap perkembangan, memanfaatkan peluang yang ada, serta yang terpenting adalah untuk menata kembali hubungan yang lebih simetris antara ketiga aktor utama (Negara/Pemerintah, Masyarakat dan Pasar).

Sebagai contoh, dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang semakin canggih, Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kemampuan para birokrat untuk menggunakan fasilitas elektronik (*e-government*) secara tepat dan optimal. Selain membangun infrastruktur yang memadai dan membuat kebijakan untuk mengatur pemberdayaan aparatur negara serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. *Capacity building* ini dapat berupa seminar, workshop, training, konferensi, dan lain-lain. Perhatian terhadap pengembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) dan penguatan SDM harus sama besar dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Bentuk pelatihan tidak hanya menyangkut bagaimana menjalankan sebuah kebijakan dengan baik, tetapi juga dalam pemahaman mengenai peluang pasar, teknik produksi, pengawasan kualitas, meningkatkan efisiensi kerja, pengetahuan hak paten, pengetahuan mengenai perkembangan perdagangan, pertanian, pelestarian budaya, pemahaman ketentuan-ketentuan dalam konteks WTO, AFTA, dan lain-lain. Kerjasama dalam bentuk *joint ventures* dan aliansi strategis di antara pemerintah, aktor transnasional dan masyarakat sangat bermanfaat guna menghadapi persaingan dan juga penyelesaian-penyelesaian sengketa yang muncul. Kemudian, memperkuat diplomasi ekonomi yang harus didukung kekuatan ekonomi internal. Peran, posisi, dan strategi Indonesia dalam forum-forum internasional juga belum menunjukkan hasil maksimal. Oleh karenanya *capacity building* mutlak harus dilakukan untuk membangun institusi dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang tangguh. Pemerintah bisa memfasilitasi upaya-upaya tersebut. ●

## Referensi

- Alam, Bachtiar. 1998. Globalisasi dan Perubahan Kebudayaan: Perspektif Teori Kebudayaan. *Jurnal Antropologi Indonesia* No 54 Tahun 1998. Hlm 1-11.
- Ananta, Aris. 2008. *Suatu Wacana mengenai Paradigma Pembangunan di Indonesia*. Radar Banjarmasin, 12 Maret 2008
- Anderson, James dkk (Ed.). 1995. "A Global World? Reordering Political Space". Oxford: Oxford University Press.
- Amri, Ulil. 2010. *Globalisasi, Degradasi Lingkungan, dan Keamanan Manusia di Kawasan Asia-Pasifik: Kasus China, Indonesia, dan Papua Nugini*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 pada tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.
- Arfani, Riza Noer. 2010. Globalisasi. Karakter dan implikasinya. *Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär* Edisi I/2004. Hlm. 1
- Ariwibowo, Sutamat. 2007. Industri Budaya di Kota Mataram dalam Era Globalisasi. Hal 55-56 dalam Retnowati, Endang (ed). 2007. *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia (Perspektif kajian Budaya)*. Studi Kasus Industri Makanan dari Negara Maju di Kota Mataram, NTB. PMB LIPI, Jakarta.
- Broszimmer, Franz. 2002. "Ecocide, A Short History of the Mass Extinction of the Species". London: Pluto Press.
- Cahyono, Imam. 2007. *Strategi Menghadapi Globalisasi*. Rubrik OPINI Harian Kompas. Senin, 29 Oktober 2007 diunduh dari <http://www.theprakarsa.org/index.php?act=dtlpub&id=20081215070511> tanggal 1/4/2012 3:16:16 PM.
- Casanova, Gonzales.1996. "Globalism, Neoliberalism, and Democracy". *Social Justice*, 23 (1-2): page 39-48.
- Elisabeth, Adriana (ed). 2009. *Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN: Isu-Isu Strategis*. LIPI Press, Jakarta.
- Firdausy, Carunia Mulya (ed). 2004. *Liberalisasi Perdagangan dan Investasi di Era Globalisasi*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta.
- Firdausy, Carunia Mulya (ed). 2005. *Pengembangan Sektor Pertanian di Era Globalisasi*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta.
- Globalisasi dan Proses Pemiskinan Negara Berkembang diunduh dari <http://waiting4caliph.blogspot.com/2010/10/globalisasi-dan-proses-pemiskinan.html> 12/13/2011 8:59:12 AM
- Laporan Tim ASEAN P2P, Ganewati Wulandari (ed). 2009. *Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. LIPI Press, Jakarta.
- Laporan PSDR LIPI. 2009. *Pengelolaan Remitansi Buruh Migran Indonesia: Studi Alokasi Remitansi dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: LIPI Press. Hlm 25-28

- Lofdahl, Corey. 2002. *Environmental Impacts of Globalization and Trade: A Systems Study*. USA: Massachusetts Institute of Technology.
- Marut, Don K. 2010. Globalisasi, Aktor non-Negara dan Hak-hak Azasi Manusia. Paper pengantar Seminar “Lumpuhnya Sistem Keadilan: Tantangan Penegakan Hak-hak Azasi Manusia dan Peran Advokat untuk Kepentingan Publik”, yang diselenggarakan oleh ELSAM, Sawit Watch, HUMA, 3 – 5 Agustus 2010, Jakarta. Hlm 1-2
- Marshall, Brent K. 1999. “Globalisation, Environmental Degradation and Ulrich Beck’s Risk Society”. *Environmental Values*, 8: 253–275 dalam Ibid Ulil Amri. 2010. Hlm 2.
- Merriam Webster Dictionary. 2010. *Globalization*.
- Perdagangan Indonesia - China. [http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/02/1153057/Perdagangan.Indonesia-China 12/14/2011 4:40:06 AM](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/02/1153057/Perdagangan.Indonesia-China%2012/14/2011%204:40:06%20AM)
- PSDR LIPI. 2011. *Policy Paper Moratorium Tenaga Kerja: Pragmatisme vs Idealisme*. Tidak di terbitkan
- Mubah, A. Safril. 2010. *Perkembangan Proses Globalisasi*. Paper Cakra Studi Global-Strategis.
- Nagib, Laila&Tjiptoherijanto, Prijono (ed). 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di antara Peluang dan Tantangan*. PPK LIPI. LIPI Press, Jakarta
- Naisbitt, John. 1995. *Global Paradox*. New York: Avian Books, hlm. 191
- Petras, James.&Veltmeyer, Henry. 2001, *Globalization Unmasked. Imperialism in 21<sup>st</sup> Century*, oleh, Zed Books, London. Page 11.
- Pudjiastuti, Tri Nuke. 2010. *Ancaman Keamanan Transnasional di ASEAN: Upaya Indonesia Menanggulangi dan Mencegah Migrant Smuggling*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.
- Rahman, Agus. R. dkk. 2007. *Globalisasi dan Gerakan Anti Globalisasi di Indonesia*. P2P LIPI. LIPI Press, Jakarta.
- Retnowati, Endang. (ed). 2007. *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia (Perspektif kajian Budaya)*. Studi Kasus Industri Makanan dari Negara Maju di Kota Mataram, NTB. PMB LIPI, Jakarta.
- Robinson, William. I. 1996. *Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony*. New York: Cambridge University Press.
- Rosegrant, Mark dkk. 2002. “World Water and Food to 2025”. Washington (DC): International Food Policy Research Institute.
- Rosegrant, Mark. dan Cline, Sarah. 2003. Global Food Security: Challenges and Policies”. *Science*, 302: page 1917-1919.
- Saiman. 2009. Tantangan Budaya Nasional Di Era Globalisasi. *Jurnal Bestari Universitas Muhammadiyah Malang*. Vol 42 (2009) diunduh dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/105> 12/15/2011 10:02:32 PM

- Soesastro, Hadi. 2004. *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*. Economics Working Paper Series. <http://www.csis.or.id/papers/wpe082> diunduh 12/13/2011 6:17:08 PM, Hlm. 8
- Siswanto. 2010. Masyarakat Eropa Dalam Merespon Globalisasi Diteropong Dari Kajian Wilayah. dalam PSDR LIPI. 2010. *Term of Reference Diskusi Panel Globalisasi Dalam Perspektif Kajian Wilayah*, Kamis, 5 Agustus 2010, Gedung Widya Graha LIPI Lantai V, Jakarta (Hal 1-8). Paper dalam proses penerbitan.
- Thee Kian Wie. 2010. Globalisasi Ekonomi Dalam Perspektif Kajian Wilayah dalam PSDR LIPI. 2010. *Term of Reference Diskusi Panel Globalisasi Dalam Perspektif Kajian Wilayah*, Kamis, 5 Agustus 2010, Gedung Widya Graha LIPI Lantai V, Jakarta (Hlm 1-8). Paper dalam proses penerbitan.
- Tim Peneliti P2E LIPI. 2010. *Liberalisasi, Dominasi Asing dan Kemiskinan Di Indonesia*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.
- Waters, Malcom. 1995. *Globalization*. London: Routledge dalam Ibid. Amri, Ulil. 2010. Hlm 2.
- Wiranta, Sukarna. 2007. *Kemiskinan dan Pemiskinan Global*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta
- Yani, Yanyan Mochamad. 2010. *Dinamika Hubungan Internasional Dan Indonesia*. Hlm 3-4